

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggara perparkiran menjadi suatu fenomena yang sering kita jumpai dalam suatu sistem tata kota dan transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan yang baik. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Meningkatnya aktivitas pada pusat perkotaan atau perdagangan akan mengakibatkan juga adanya peningkatan perjalanan yang dapat meningkatkan parkir di daerah atau kawasan perdagangan atau kota tersebut. Hal ini akan menyebabkan lokasi parkir baru di badan jalan. Kondisi penyelenggara parkir yang tidak baik dapat memberikan gangguan sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul akibat adanya hambatan lalu lintas dan dapat mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

Kota Bandung terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Wilayahnya terbagi dalam 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan/Desa. Kota ini terletak di kawasan yang strategis baik dalam skala regional maupun nasional, yaitu sebagai sentra perdagangan dan jasa di Jawa Barat, dan sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Barat. Kota Bandung terletak di dasar lengkungan yang dikelilingi oleh barisan pegunungan yang kokoh

dengan jumlah pedesaan yang banyak. Hal ini juga menjadi daya tarik dalam sisi kekayaan budaya dan wisata. Posisi Kota Bandung sebagai pusat pengembangan di Provinsi Jawa Barat membuat Kota ini menjadi pusat perhatian di Jawa Barat.

Bandung kerap dilanda kemacetan parah, parkir liar dituding menjadi salah satu dalang utama kemacetan kota kembang. Sementara aktivitas lalu lintas semakin padat dikarenakan volume kendaraan di Kota Bandung yang juga semakin meningkat. Tak pelak, kemacetan pun banyak terjadi di beberapa titik pusat perbelanjaan maupun jalan protokol di Kota Bandung. Kawasan Braga Kota Bandung menjadi kawasan wisata di tengah-tengah pusat kota. Di tengah indahnya kawasan tersebut, kerap terjadi kemacetan di kawasan Braga Kota Bandung. Salah satu penyebab kemacetan di Jalan Braga, kecilnya jalan serta banyaknya ruas jalan yang dipakai untuk parkir liar. Lahan parkir di jalan Braga Kota Bandung yang terbatas dan banyaknya oknum tukang parkir ilegal tanpa izin disinyalir menjadi salah satu penyebab timbulnya parkir liar yang belakangan semakin tak terhindari dan lahan parkir yang tidak memiliki izin, terutama di akhir pekan maupun saat libur panjang tiba. Seperti yang tercantum di dalam Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Parkir, di dalam BAB III pasal 5 ayat 2 point A yaitu : a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.”

Adanya toko, restoran, pusat perbelanjaan hingga bisnis travel yang tidak memiliki lahan parkir yang mengakibatkan timbulnya oknum tukang parkir liar

yang tidak memiliki izin untuk mengatur parkir tersebut dan menata kendaraan pengunjung kawasan jalan Braga yang menggunakan bahu jalan padahal tempat tersebut tidak memiliki izin serta sudah dipasang plang dilarang parkir yang mengakibatkan tidak tertibnya perparkiran di kawasan jalan tersebut. Padahal, hal tersebut berpotensi membuat kondisi lalu lintas di sekitarnya semakin padat. Di sisi lain, menyediakan lahan parkir yang memadai pun bukan perkara mudah mengingat keterbatasan lahan kosong yang dimiliki masing-masing usaha. Kurangnya lahan atau tempat parkir dapat memunculkan dan menyuburkan parkir liar di Kota Pekalongan. Bertambahnya pusat perbelanjaan dan pusat kuliner yang pesat maka kebutuhan pengguna jasa parker untuk memarkir kendaraannya juga semakin bertambah. Hal ini memunculkan juru parkir dan titik parkir baru yang tidak mempunyai legalitas. Munculnya juru parkir liar yang ditandai dengan tidak lengkapnya atribut juru parkir yang telah diatur dalam Perda juga terdapat pada beberapa titik parkir yang telah ditetapkan sebagai titik parkir. Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.03 tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran, sebagaimana yang tertuang didalamnya dalam BAB III, pasal 3 ayat 1 yaitu, Setiap tempat parkir harus memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota;
- b. keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. penataan dan kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
- e. estetika kota.”

Dengan demikian dan keadaan kondisi jalan Braga Kota Bandung saat ini seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bandung mencari solusi bersama untuk

segera menyelesaikan permasalahan ini, karena semakin padatnya volume kendaraan di Kota Bandung dan juga jalan Braga yang menjadi bagian vital Kota Bandung karena jika sudah memasuki akhir pekan atau libur panjang. Belum lagi banyaknya wisatawan yang masuk ke Kota Bandung. Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bandung khususnya di jalan Braga. Koordinasi seringkali terlupakan dalam hal penyelesaian suatu masalah, Dinas Perhubungan dan Satpol PP kota Bandung seharusnya dapat berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan parkir liar ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat indikasi – indikasi yang memperlihatkan tidak efektifnya koordinasi penertiban parkir liar di kawasan jalan Braga Kota Bandung antara lain:

1. Belum terlaksananya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Bandung
2. Kurangnya ketaatan dalam pelaksanaan koordinasi parkir liar
3. Belum dapat menertibkan oknum parkir liar yang masih berkeliaran disekitar jalan braga

4. Belum adanya program edukasi terhadap masyarakat yang masih belum paham terhadap peraturan tentang parkir liar di jalan Braga
5. Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap pelaku oknum parkir liar yang akibatnya terus ada untuk mengatur parkir liar
6. Belum teralisasinya program penertiban yang dilakukan secara berkala dalam rangka penertiban parkir liar

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut dan paparan diatas peneliti tertarik dan ingin mencoba menghubungkan melalui pendekatan teori Koordinasi, agar Koordinasi Penertiban Parkir Liar di Kawasan Jalan Braga Kota Bandung dapat berjalan dengan baik dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandung agar dapat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.03 tahun 2008 tentang Penyelenggara Parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti menentukan teori koordinasi, sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif, dikarenakan koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penelitian ini, sehingga peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**“Koordinasi Penertiban Parkir Liar di Kawasan Jalan Braga Kota Bandung”.**

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Koordinasi Penertiban Parkir Liar di kawasan Jalan Braga Kota Bandung yang belum optimal.

## **1.3. Identifikasi Masalah**

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus, jelas, serta sesuai dengan maksud penelitian, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi tentang penertiban parkir liar di Kota Bandung di kawasan jalan Braga?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi penertiban parkir liar di kawasan jalan Braga Kota Bandung?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam koordinasi penertiban parkir liar di kawasan jalan Braga Kota Bandung?

## **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan bagaimanakah Koordinasi antar pemerintah Kota Bandung dan dengan pelaku usaha di kawasan Jalan Braga dalam hal perparkiran di kawasan jalan Braga Kota Bandung dalam memaksimalkan dan memperbaiki koordinasi antar pemerintahan terkait.

### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Koordinasi yang terjadi di pemerintahan Kota Bandung dan pelaku usaha di sekitar kawasan Jalan Braga terkait dengan masalah parkir liar di kawasan Jalan Braga Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Koordinasi Penertiban Parkir Liar di Kawasan Jalan Braga Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Koordinasi Penertiban Parkir Liar di kawasan Jalan Braga Kota Bandung.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini antara lain :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan memperkaya penelitian ilmiah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan khususnya dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Bandung serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Daerah Kota Bandung untuk lebih mengoptimalkan Koordinasi Penertiban Parkir Liar di kawasan Jalan Braga Kota Bandung.